

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG PENDIDIKAN DI DESA KEDUNGROJO KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

Ganang Dibya Angkasa

(S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
ganangdibyaangkasa@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

(S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Salah satu program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang mempunyai jumlah KSM yang cukup banyak dan adanya anak yang tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikannya serta adanya KSM yang masuk dalam kriteria peserta penerima bantuan namun tidak terdaftar sebagai peserta penerima dana bantuan PKH. Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Subyek penelitian ini terdiri dari Pendamping PKH Desa Kedungrojo, Guru, masyarakat penerima PKH di Desa Kedungrojo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dilihat dari enam variabel keberhasilan implementasi yaitu, standar, tujuan dan sasaran kebijakan sudah sesuai dengan standar, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kedua untuk sumber daya manusia tidak terdapat hambatan, semua sudah ditetapkan dan difungsikan sesuai tugasnya masing-masing, untuk sumber daya finansial perlu adanya penambahan dana tambahan supaya dapat mencukupi sejumlah KSM yang belum terdaftar menjadi peserta PKH, dan sumber daya waktu meliputi pencairan dana terdapat kendala yaitu sering mengalami keterlambatan dalam pencairan dana bantuan. Ketiga, karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keempat, disposisi implementor adanya dukungan positif dari pelaksana program. Kelima, koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana program kurang berjalan baik serta komunikasi yang berjalan dari UPPKH maupun dari Pendamping kurang intensif dalam penyampaian pelaksanaan program. Keenam, lingkungan sosial dalam penelitian ini adalah respons positif yang diberikan oleh warga Desa Kedungrojo, lingkungan politik yaitu adanya dukungan dari Kepala Desa, Camat dan Bupati dan lingkungan ekonomi yang kurang kondusif dan sangat memberi pengaruh terhadap jalannya program. Saran pelaksana pusat UPPKH perlu memberlakukan pembaruan data yang jelas dan akurat dalam pemilihan calon peserta PKH, sehingga KSM terpilih menjadi peserta sesuai dengan sasaran yang dituju, perlu adanya penambahan dana tambahan supaya dapat mencukupi sejumlah KSM yang belum terdaftar menjadi peserta PKH, Pendamping dan pelaksana pusat UPPKH harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada peserta PKH yang kurang bijak dalam menggunakan dana bantuan, Koordinasi dan Komunikasi antara pusat UPPKH maupun Pendamping harus berjalan dengan baik agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan, serta peserta PKH khususnya masyarakat Desa Kedungrojo yang terdaftar harus lebih bijak dalam menggunakan dana bantuan yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan yang sesuai dari tujuan program.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Pendidikan

Abstract

One of the Government's program to accelerate poverty reduction is a family Program Expectations issued by virtue of presidential Regulation No. 15 of 2010 about Accelerating poverty reduction. Kedungrojo

village sub district Tuban Plumpang is one of the villages which have a significant amount of SHGS and the presence of children who could not continue their education level, as well as the existence of SHGS in the criteria of the participants a recipient but not registered as a participant in the grant recipient PKH. This needs to be held a deep study on the implementation of the Program of family Expectations at the village of Kedungrojo, considering that this program has been running for a little over 4 years. Standards, goals and objectives policy is in compliance with the standards, goals and objectives are set. Both for human resources there is no obstacle, all is set and enabled appropriate to his duties, respectively, to the financial resources of the need for the addition of additional funds in order to fullfill a number of SHGS that have yet to be registered PKH participants, time and resources include disbursements, there is a constraint that is often experienced a delay in disbursement of aid. Third, the characteristics of the implementing agency is in compliance with the duties and functions of each. Fourth, the disposition of a positive endorsement of the implementor of the implementing programs. Fifth, coordination is done by the executing program is less a good run as well as communication that runs from UPPKH or from the Companion is less intensive in the delivery of program implementation. Sixth, the social environment in this research was the positive response given by the citizens of the village of Kedungrojo, i.e. the existence of a political environment of support from the village head, Head and Regent and less conducive economic environment and highly influential against the course of the program. Implementing advice centre UPPKH need to enforce updates data in a clear and accurate pemilhan potential participants PKH, so SHGS elected participant in accordance with the intended target, the need for the addition of additional funds in order to fullfill a number of SHGS that have not yet registered to become a participant and implementer's Companion, PKH Center UPPKH should be more resolute in giving sanctions to participants of the PKH less wise in using the aid funding, coordination and communication between the Centre of the UPPKH as well as Companion must go well so that program execution goes according with the objectives, as well as participants of the PKH especially villagers Kedungrojo listed need to be more wise in using the aid funds provided are used to meet the educational needs and health objectives of the appropriate.

Keywords: Implementation, Program Keluarga Harapan, Education

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial adalah cita-cita leluhur dari pendiri negara kita. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang besar, dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat semakin banyak pula berbagai permasalahan yang terjadi seperti kemiskinan. Masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatiannya secara serius terhadap penanggulangan masalah kemiskinan dan perlu membuat kebijakan atau program nasional yang berkaitan dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Landasan hukum yang mendasari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain :

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
2. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
4. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor BJS/85/05/04/V/2009 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2009 (www.kemsos.go.id).

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya di Negara Amerika dengan nama konsep *Conditional Cash Transfer* (CCT), yang diterjemahkan bantuan tunai bersyarat. Program PKH ini bukan dimaksudkan sebagai lanjutan dari program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin.

PKH terdiri atas program dibidang kesehatan dan dibidang pendidikan dimana setiap keluarga yang menjadi sasaran program ini berhak mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan, mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan di puskesmas, posyandu, polindes dan sebagainya, mendapat pelayanan pendidikan bagi yang belum atau tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal. Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilaksanakan di Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban memiliki 20 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bancar, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Jenu, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Kerek, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Montong, Kecamatan Palang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Rengel, Kecamatan Semanding, Kecamatan Senori, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Soko, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Widang, Kecamatan Tuban.

Kecamatan Plumpang telah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai tahun 2014, Kecamatan Plumpang khususnya di Desa Kedungrojo peneliti memilih Desa Kedungrojo sebagai lokasi penelitian dikarenakan masih adanya variabel-variabel penghambat pelaksanaannya sebuah implementasi suatu program namun di Desa Kedungrojo juga Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan membuahkan sebuah inovasi baru, Desa Kedungrojo juga memiliki bank sampah yang dimana program tersebut adalah sebuah inovasi dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Plumpang di Desa Kedungrojo sudah dilaksanakan, namun demikian tidak terlepas dari hambatan/hal-hal yang tidak sesuai dengan

program ini. Adapun persoalan yang berkenaan dengan PKH yang berjalan di Desa Kedungrojo selama ini, yakni: pertama, pola pikir masyarakat yang kurang bijak dalam mengelola uang bantuan, uang yang diterima tidak dipergunakan untuk membiayai peralatan sekolah.

Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Banyak orang tua dari Desa Kedungrojo yang memutuskan jenjang pendidikan anaknya menuju ke Sekolah Negeri Menengah, kebanyakan orang tua mengeluh akan biaya ataupun sikap dan perilaku anak yang kurang baik.

Ketiga, mengenai data kelayakan peserta PKH yaitu adanya ketidaktepatan sasaran dalam PKH ini, ditemukannya KSM yang masuk dalam kriteria akan tetapi tidak terdaftar dalam PKH sedangkan ada warga yang sudah mampu atau tidak layak masuk di dalam kriteria PKH masih terdaftar sebagai peserta PKH.

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Kesimpulannya kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan. Nilai nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan yang sistematis dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang tengah dihadapi masyarakat.

Analisis penulis dari definisi di atas adalah Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang mengarahkan pada pencapaian suatu tujuan dan pada sebagai perilaku atau tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dibuat oleh pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal ini adalah pemerintah atau pejabat pemerintah yang kemudian bersifat mengikat dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan suatu kebijakan. Praktek implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi juga menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

C. Model-Model Implementasi

Model implementasi yang cocok untuk implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo Kecamatan Plumpang bidang Pendidikan adalah menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn karena teori ini lebih spesifik dalam mengulas faktor-faktor pendorong dan penghambat pengimplementasian program. Terdapat enam variable menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, fokus penelitian menggunakan teori Van Matter dan Carl Van Horn. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Kedungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono (2014) yaitu *Data collection*, *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing and Verifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada hasil penelitian yang telah didapat pada indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mencakup enam variable dan hal ini sangat sesuai untuk menganalisis data yang sudah didapat dalam penelitian ini. Berikut analisis Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam Program Keluarga Harapan ini juga terdapat sasaran yang harus dituju. Sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah Keluarga Sangat Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Sehubungan dengan ini kebijakan dari Program Keluarga Harapan sendiri masih belum tepat. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil peneliti ketika dilapangan bahwa masih ada KSM yang tidak termasuk kriteria peserta PKH, sedangkan pada saat bersamaan ada masyarakat yang masuk kriteria tetapi tidak terdaftar dalam peserta PKH

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Selain sumber daya manusia yang mencukupi, untuk menentukan keberhasilan implementasi PKH, kualitas atau kemampuan sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Khususnya untuk Pendamping, Guru yang dirasa sudah cukup berkompeten dalam melaksanakan PKH di Desa Kedungrejo ini, pendamping di Desa Kedungrejo berpendidikan S1 dan guru desa berpendidikan S1. Dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki Pendamping dan Guru tersebut berdampak pada kecepatan, ketepatan dan ketanggapan dalam memberikan pelayanan kepada KSM.

Namun terkait dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan PKH ini, masih terdapat beberapa kendala yaitu dukungan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dirasa kurang, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak ikut andil secara penuh dalam pelaksanaan PKH di Desa Kedungrejo ini dan juga KSM di Desa Kedungrejo yang berpendidikan rendah yang berakibat pada

kejelasan informasi yang diberikan dari Pendamping.

b. Sumber Daya Finansial

Dalam penyaluran dana bantuan kepada KSM tersebut dana yang diperoleh tidak mendapatkan potongan sepeserpun sehingga KSM dapat menerima penuh bantuan tersebut. Jadi dalam penyaluran dana bantuan tidak mengalami permasalahan hal jumlah bantuan yang diterima. Akan tetapi perlu adanya penambahan dana yang dikucurkan di Desa Kedungrojo guna mendaftarkan KSM di Desa Kedungrojo yang masuk kriteria PKH agar bisa menjadi peserta PKH

c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya yang perlu diperhatikan selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial yaitu sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia dan sumber daya finansial mendukung akan waktu yang dipergunakan dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak mencukupi, maka hal ini dapat menjadi bagian ketidakberhasilan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 sumber daya waktu yang diteliti yaitu waktu penyaluran dana bantuan, waktu pertemuan kelompok dan absensi siswa yang wajib diikuti para peserta PKH bidang pendidikan.

Mengenai waktu penyaluran bantuan, bantuan dana kepada peserta PKH diberikan setiap 3 bulan sekali, tempat penyaluran dana sendiri berada di kantor Pos yang ada di kecamatan masing-masing, dalam penyaluran ini peneliti menemukan permasalahan mengenai penyaluran dana bantuan yaitu mengenai keterlambatan dalam melakukan pencairan dana, pencairan yang dilakukan biasanya mundur satu bulan sampai 2 bulan dari waktu pencairan yang ditetapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Selain Kepala Desa dan guru karakteristik agen pelaksana yang mendukung berjalannya Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo ini sendiri adalah Pemerintah Desa Kedungrojo, Pemerintah Desa Kedungrojo mendukung adanya Program Keluarga Harapan ini, karena program ini sejalan dengan visi dari Pemerintah desa Kedungrojo itu sendiri.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Kedungrojo para agen pelaksana mempunyai

karakteristik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

4. Disposisi Implementor

Pada penelitian ini pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo mendapatkan respon positif dari para pelaksana yaitu Pendamping dan Guru di desa. Respon positif tersebut ditunjukkan oleh para pelaksana dalam bentuk komitmen mereka ketika melaksanakan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo. Bentuk komitmen tersebut ditunjukkan dengan sikap melayani para KSM dengan tanpa pamrih serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing pada saat pelaksanaan program.

5. Komunikasi antar Organisasi

a. Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo dilakukan oleh beberapa pihak yaitu, Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa, Pendamping dan Guru. Pada praktiknya, Kepala Desa telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada panitia pelaksana untuk melakukan koordinasi selanjutnya. Kepala Desa pada program ini hanya bertugas sebagai penanggung jawab Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Kedungrojo ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan Program Keluarga Harapan, para pelaksana yang terlibat telah berkoordinasi dengan baik, para pelaksana telah berfungsi sesuai dengan masing-masing tugas yang telah dibebankan.

b. Komunikasi

Masalah yang ditemukan di lapangan adalah komunikasi yang dilakukan antara Guru dengan Pendamping sedikit mengalami hambatan. Guru sering mengalami kesulitan mencari dan berkoordinasi dengan Pendamping karena Pendamping sering keluar rumah, selain itu terdapat permasalahan komunikasi dengan para KSM, KSM di Desa Kedungrojo rata-rata berpendidikan rendah kebanyakan dari mereka hanya lulus tingkat SD bahkan ada pula yang tidak pernah mengenyam pendidikan sehingga hal tersebut menghambat dalam hal bahasa, dalam melakukan komunikasi dengan KSM, Pendamping banyak menggunakan bahasa jawa dan dengan kata-kata yang sesederhana mungkin.

Dalam hal ini peneliti menilai bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo implementor sudah mengkomunikasikan pelaksanaan program dengan baik, terbukti dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pendamping setiap satu bulan sekali.

6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

a. Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial di Desa Kedungrojo dimana masyarakat Desa Kedungrojo mempunyai hubungan yang sangat erat antar anggota masyarakat karena kebanyakan dari masyarakat Desa Kedungrojo mempunyai hubungan darah. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap informasi yang mudah tersebar dan memudahkan implementor yaitu Pendamping dalam melakukan sosialisasi, masyarakat Desa Kedungrojo juga merespon positif terhadap PKH di Desa kedungrojo ini. Hal tersebut dikarenakan adanya program ini merupakan program yang memiliki tujuan sosial. Dengan adanya dukungan positif dari masyarakat Desa Kedungrojo tersebut membuat para implementor di Desa Kedungrojo khususnya Pendamping dan Guru menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam variabel lingkungan sosial ini peneliti menemukan permasalahan yaitu adanya nuansa persaingan yang dilakukan antar anggota masyarakat guna menunjukkan kelas sosial yang mereka miliki, hal tersebut juga berdampak pada penggunaan dana yang diterima dari Program Keluarga Harapan. Dalam hal ini peneliti menemukan adanya dana bantuan yang diberikan kepada KSM yang digunakan untuk membayar kredit sepeda motor dan kebutuhan rumah tangga lainnya, hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kelas sosial para KSM didalam masyarakat.

b. Lingkungan Politik

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, unsur politik dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah adanya dukungan dari Kepala Desa Kedungrojo. Dukungan yang diberikan dari Kepala Desa adalah pemberian tempat kepada Pendamping dalam melakukan pertemuan dengan kelompok yang diadakan setiap satu bulan sekali. Namun dalam pemberian tempat ini para KSM kurang

antusias karena letaknya jauh dengan rumah KSM. Selain itu ada dukungan juga dari pihak luar seperti Camat Kecamatan Plumpang dan Bupati Kabupaten Tuban dengan adanya dukungan tersebut Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo dapat berjalan secara baik.

c. Lingkungan Ekonomi

Kondisi ekonomi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah terkait dengan keadaan perekonomian KSM yang ada di Desa Kedungrojo, kebanyakan KSM di Desa Kedungrojo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh pabrik, dengan pekerjaan tersebut para KSM hanya mendapatkan penghasilan yang sedikit, sehingga hal ini berdampak pada penggunaan dana bantuan yang diberikan. Dana bantuan akhirnya tidak dipergunakan untuk kebutuhan kesehatan maupun pendidikan anak-anak mereka akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menilai bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kondisi ketika pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini dilakukan. Dengan adanya kondisi ekonomi yang ditunjukkan masyarakat Desa Kedungrojo, maka pencapaian tingkat keberhasilan program juga akan terpengaruh. Kondisi ekonomi yang ada tersebut akan menghambat tercapainya tujuan-tujuan PKH yang ditetapkan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan standard dan tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu masih ditemukannya permasalahan masyarakat yang belum menunjukkan adanya peningkatan ekonomi. Sasaran dari kebijakan masih belum tepat karena masih ditemui ada masyarakat yang tidak masuk kriteria dan juga ada masyarakat yang masuk kriteria tapi tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan.

Sumber daya manusia, finansial dan waktu. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan bidang pendidikan di Desa Kedungrojo sudah didukung dengan pelaksana yang kompeten. Terutama bagi Pendamping yang berpendidikan S1 dan juga Guru yang berpendidikan S1. Sumber daya finansial yaitu mengenai bantuan yang diberikan untuk KSM yang

berasal dari APBN, bantuan yang diterima para KSM yang besarnya berbeda-beda menurut tanggungan anak didalam keluarganya dan sumber daya finansial lainnya yaitu dana yang diberikan kepada Pendamping yang berasal dari APBN dan APBD dengan perbandingan 40% dari APBD dan 60% dari APBN, dalam sumber daya finansial ini perlu adanya penambahan dana untuk KSM yang belum terdaftar di PKH. Sumber daya waktu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini terdapat tiga yaitu waktu pencairan dana bantuan, waktu pertemuan kelompok yang dilakukan oleh Pendamping dan waktu absensi siswa yang wajib dilakukan oleh siswa yang terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan, dalam sumber daya waktu ini menemukan permasalahan yaitu mengenai keterlambatan dana bantuan dan ketidak hadiran KSM dalam pertemuan kelompok.

Komunikasi antar organisasi. Koordinasi dari para pihak-pihak yang terlibat yaitu Pendamping, Guru, Kepala Desa dan juga ketua kelompok KSM sudah terjalin dengan baik, terbukti dengan adanya kerjasama antara Pendamping dengan Guru, dan juga dengan ketua kelompok KSM sebelum ataupun pada saat pelaksanaan program. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo dikomunikasikan dengan baik oleh Pendamping kepada KSM dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi tersebut disampaikan setiap diadakannya pertemuan dengan kelompok.

Karakteristik agen pelaksana. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo adalah Kepala Desa, Guru dan Pemerintah Desa Kedungrojo. Kepala Desa Kedungrojo memberikan persetujuan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrojo yang telah diajukan oleh Pendamping PKH. Selain itu Kepala Desa Kedungrojo merupakan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan PKH di Desa Kedungrojo. Guru sebagai pendukung Pendamping di Desa Kaedungrojo dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Desa Kedungrojo mendukung berjalannya Program Keluarga Harapan karena sejalan dengan visi Desa Kedungrojo.

Disposisi implementor. Respon dari petugas pelaksana sangat positif, respon positif dapat dilihat dari komitmen para pelaksana dalam melakukan

tugasnya, para petugas pelaksana sudah paham dengan tugas dan fungsinya, dan para petugas juga sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Lingkungan sosial politik dan ekonomi. Kondisi lingkungan sosial yang ada di Desa Kedungrojo yaitu saling guyub rukun, hubungan antar masyarakat Desa Kedungrojo sangat erat sehingga hal ini berpengaruh terhadap sebuah informasi, warga Desa Kedungrojo menerima program ini karena program ini bertujuan positif, namun didalam lingkungan sosial terdapat masalah yaitu ditemukannya nuansa persaingan untuk menunjukkan kelas sosial masyarakat Desa Kedungrojo hal ini berpengaruh terhadap penggunaan dana bantuan yang diberikan.

B. Saran

1. Pelaksana pusat UPPKH perlu memberlakukan pembaruan data yang jelas dan akurat dalam pemilihan calon peserta PKH, sehingga KSM terpilih menjadi peserta sesuai dengan sasaran yang dituju.
2. Perlu adanya penambahan dana tambahan supaya dapat mencukupi sejumlah KSM yang belum terdaftar menjadi peserta PKH.
3. Pendamping serta UPPKH harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada peserta PKH yang menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan.
4. Koordinasi dan Komunikasi antara UPPKH maupun Pendamping harus berjalan dengan baik agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan
5. Masyarakat Desa Kedungrojo khususnya yang terdaftar menjadi peserta PKH, harus lebih bijak dalam menggunakan dana bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan yang sesuai dari tujuan Program Keluarga Harapan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal skripsi ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Dengan adanya berbagai bantuan dari berbagai pihak, tantangan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa, dosen pembimbing ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., yang selalu

memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi, serta terima kasih untuk seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu pada penulis. Beserta staf Administrasi tata usaha yang telah membantu kelancaran pengurusan proses skripsi penulis hingga terselesaikan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik.
Bandung : CV Alfabeta Bandung.

Moeloeng , Lexy J. 2011. Metode Penelitian
Kualitatif Edisi Revisi.
Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Soetomo. 2007. Teori-teori social dan kebijakan
publik.
Jakarta: Permana media Group.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&D.
Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif.
Bandung : Alfabeta

Soenarko. 2005. Public Policy : pengertian Pokok
Untuk Memahami dan Analisa
Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya :
Airlangga University Press

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik.
Bandung: AIPI.

Wahab, S. 2002. Analisis Kebijaksanaan: Dari
Formulasi Keimplementasi kebijaksanaan
Negara. Jakarta:Bumi Aksara

Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan
Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zuriah, N. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan
Pendidikan : Teori Aplikasi.
Jakarta : Bumi Akasara

Tachjan. 2006, Implementasi Kebijakan Publik.
Bandung: AIPI

Website:

www.kemsos.go.id , di akses pada tanggal 15 April
2017.

Buku:Buku Pedoman Umum Program Keluarga
Harapan Monografi Desa Kedungrojo Kecamatan
Plumpang Kabupaten Tuban